

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Imigrasi dari India ke Australia mulai meningkat sejak tahun 1970-an setelah pelonggaran Undang – Undang Pembatasan Imigrasi diubah oleh Australia.¹ Menurut data dari Australian *Bureau of Statistics*, pada tahun 2017 sebanyak 38.000 ribu imigran India datang ke Australia, fakta ini menjadikan India sebagai negara imigran terbanyak di Australia.² Hingga pada tahun 2023, kurang lebih terdapat 670.000 ribu orang India yang menetap di Australia. Persentase tersebut naik dengan pesat selama 6 tahun, mempertahankan posisi India sebagai negara dengan imigran terbanyak di Australia.³

Australia memiliki ekonomi yang stabil dan terus berkembang sejak 1990-an, diikuti dengan politik dan lingkungan sosial yang mendorong perkembangan tersebut.⁴ Saat ini Australia mencari negara – negara di kawasan sebagai sumber utama imigran terampil yang sesuai untuk mengisi defisit dalam tenaga kerja.⁵ Tawaran pekerjaan di negara dengan ekonomi yang lebih stabil tentunya lebih menarik bagi imigran, terutama di negara yang maju dengan kualitas hidup yang lebih layak. Australia adalah negara yang tepat bagi orang – orang berpengalaman

¹ S.P. Awasthi and Ashoka Chandra, “Migration from India to Australia,” *Asian and Pacific Migration Journal* 3, no. 2-3 (Juni 1994): 393–409, <https://doi.org/10.1177/011719689400300207>.

² Matt Liddy, “Migran Baru Australia Paling Banyak Berasal Dari India,” www.abc.net.au, Agustus 20, 2018, <https://www.abc.net.au/indonesian/2018-08-20/asal-migran-di-australia/10140414>

³ Australian Bureau of Statistics, “Cultural Diversity of Australia | Australian Bureau of Statistics,” www.abs.gov.au, September 20, 2022, <https://www.abs.gov.au/articles/cultural-diversity-australia#overseas-born-in-australia>.

⁴ Department of Foreign Affairs and Trade, “Australian Embassy In,” indonesia.embassy.gov.au, accessed Agustus 6, 2024, https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/gambaran_sekilas.html.

⁵ Matt Liddy, “Migran Baru Australia Paling Banyak Berasal Dari India,” www.abc.net.au, August 20, 2018, <https://www.abc.net.au/indonesian/2018-08-20/asal-migran-di-australia/10140414>

di bidang teknologi dan India adalah salah satu negara penghasil teknisi.⁶ Peluang pendidikan yang bagus di Australia turut menarik minat imigran India, adanya kesempatan kerja yang lebih besar mendukung transisi dari pendidikan ke karir menambah alasan mengapa imigran memilih menempuh pendidikan di Australia.⁷ Hubungan diplomatik yang semakin erat juga turut mendorong pertukaran di bidang pendidikan dan ekonomi baik di India maupun di Australia.⁸ Kebijakan imigrasi menjadi titik utama kedatangan imigran India secara besar – besaran ke Australia.

Penerapan kebijakan imigrasi dengan nilai – nilai multikultural oleh Australia merupakan sebuah proses *policy transfer* yang dipengaruhi oleh Kanada dan organisasi internasional. Kanada resmi mengadopsi kebijakan multikulturalisme pada tahun 1971 dan menjadi negara pertama yang menerapkannya.⁹ Australia memperhatikan keberhasilan Kanada dan mencontoh kebijakan multikulturalisme yang Kanada terapkan namun menggabungkannya dengan kebijakan imigran. Pengaruh organisasi internasional dalam *policy transfer* yang diambil oleh Australia adalah praktik dan pengalaman yang didapat dalam forum, seperti forum Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) atau *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO). Dua forum tersebut fokus

⁶ Amin Ali, “Why Australia Is Such a Hot Market for Technologists,” *The Times of India*, Maret 7, 2023, <https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/work-experience-proficiency-in-english-and-education-carry-points-if-spouse-is-in-the-same-profession-you-get-additional-points/articleshow/98467133.cms?from=mdr>

⁷ Study Australia, “Bekerja Setelah Lulus,” [Studyaustralia.gov.au](https://www.studyaustralia.gov.au), 2024, <https://www.studyaustralia.gov.au/id/work-in-australia/work-after-graduating>.

⁸ Department of Education Australian Government, “Australia’s Education Strategy for India Released,” [education.gov.au](https://www.education.gov.au), 2023, <https://www.education.gov.au/newsroom/articles/australias-education-strategy-india-released>

⁹ John W. Berry, “Research on Multiculturalism in Canada,” *International Journal of Intercultural Relations* 37, no. 6 (November 2013): 663–75, <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2013.09.005>.

membahas isu – isu terkait multikultural, hak asasi manusia, dan keberagaman budaya.

UNESCO pada tahun 1970-an menjadi pendorong besar bagi beberapa negara termasuk Australia dalam menerapkan kebijakan yang menerima berbagai etnis dan budaya.¹⁰ UNESCO awalnya hanya berfokus pada kebijakan migrasi untuk mengatasi isu – isu migrasi yang semakin mempengaruhi politik, demografi, sosial, dan budaya.¹¹ Namun imigrasi menjadi sebuah isu yang juga harus diperhatikan, perlu adanya kebijakan yang dapat melindungi imigran namun tidak hanya di lingkungan kerja, tapi di negara itu sendiri. Bagi Australia, UNESCO menjadi salah satu dorongan yang akhirnya membuat pemerintah mengadopsi kebijakan imigrasi dengan nilai – nilai multikultural dan Kanada sebagai negara yang dicontoh.

Kebijakan imigrasi Australia adalah kebijakan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan demografis negara.¹² Program ini dibagi menjadi dua kategori utama yaitu, program imigrasi permanen dan program migrasi pengungsi dan kemanusiaan. Kebijakan imigrasi sering berubah menyesuaikan kebutuhan untuk memastikan imigran mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, termasuk pembatasan visa pelajar dan pekerja sementara.

Terlepas dari penerapan nilai – nilai multikultural di dalam kebijakan imigrasi, diskriminasi, rasisme, dan kekerasan tidak sepenuhnya terhapuskan. Masalah mulai muncul saat semakin banyak imigran India yang masuk. Para imigran dari Asia

¹⁰ Serim Timur, “Changing Trends and Major Issues in International Migration: An Overview of UNESCO Programmes,” *International Social Science Journal* 52, no. 165 (September 2000): 255–68, <https://doi.org/10.1111/1468-2451.00257>.

¹¹ Serim Timur, “Changing Trends and Major Issues in International Migration: An Overview of UNESCO Programmes,” *International Social Science Journal* 52, no. 165 (September 2000): 255–68, <https://doi.org/10.1111/1468-2451.00257>.

¹² Department of Foreign Affairs and Trade, “Australian Embassy In,” indonesia.embassy.gov.au, accessed August 6, 2024, https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/gambaran_sekilas.html.

terutama India menjadi target diskriminasi, rasisme, dan kekerasan di Australia. Penampilan mereka diberi label, menirukan mimik wajah, hingga diskriminasi terhadap perempuan yang berhijab.¹³ Rata – rata mereka yang memiliki penampilan dengan perbedaan mencolok menjadi target rasisme dan diskriminasi, warna kulit yang berbeda, ras yang berbeda, dan agama yang berbeda.

Tahun 2019 saat COVID-19, muncul larangan perjalanan antara India dan Australia dimana orang – orang India yang tinggal di Australia dilarang pulang ke Australia.¹⁴ Para menteri senior di pemerintahan membela larangan tersebut dengan alasan bahwa larangan tersebut disarankan oleh ahli medis untuk melindungi warga Australia. Namun larangan tersebut tidak sesuai dengan nilai – nilai Australia, mereka adalah orang – orang India yang telah menetap kemudian menjadi warga Australia, dan menjadi tanggung jawab Australia dalam menjaga warganya.

Pada tahun 2009 – 2010 SBS News melaporkan terjadinya serangan di Melbourne terhadap orang - orang India yang merupakan pelajar, mengakibatkan protes, pemberitaan, dan menurunnya jumlah pelajar yang mendaftar di Australia. Efek dari serangan ini memaksa pemerintah Australia mengirim Perdana Menteri Kevin Rudd ke India untuk memperbaiki hubungan diplomatik yang akhirnya melahirkan Australia India *Institute*.¹⁵ Tahun 2021 mantan pemain kriket Yorkshire Azeem Rafiq bersaksi di depan Komite Digital, Budaya, Media, dan Olahraga

¹³ Republika.co.id dan ABC News, “Ternyata Perempuan Imigran Jadi Objek Rasisme Di Australia,” Republika Online (Republika Online, Oktober 17, 2013), <https://internasional.republika.co.id/berita/mut7w5/ternyata-perempuan-imigran-jadi-objek-rasisme-di-australia>.

¹⁴ ABC News, “Jail Time, Fines Now a Risk for Australians Who Try to Return from India,” www.abc.net.au, Mei 2, 2021, <https://www.abc.net.au/news/2021-05-03/india-covid-travel-ban-australia-jail-fines-breach/100111452>.

¹⁵ Sukhmani Khorana, “It’s Not Surprising Indian-Australians Feel Singled Out. They Have Long Been Subjected to Racism,” SBS News, Mei 4, 2021, <https://www.sbs.com.au/news/article/its-not-surprising-indian-australians-feel-singled-out-they-have-long-been-subjected-to-racism/q3sxplkc0>.

House of Commons tentang rasisme yang dialami saat bermain untuk Australia.¹⁶ Para pemain Asia Selatan berulang kali menjadi sasaran ejekan dan pelecehan rasis di ruang ganti dan penonton pertandingan.¹⁷

Semestinya kedatangan imigran yang bertambah di Australia membawa banyak manfaat seperti keragaman budaya dan kontribusi ekonomi. Namun di balik suksesnya kebijakan imigrasi, kasus rasisme, diskriminasi, dan kekerasan menjadi masalah baru di Australia. Budaya yang berbeda antara India dan Australia dapat memicu stereotip dan prasangka yang di dasarkan pada asal negara. Rasisme terjadi karena ketidakmampuan masyarakat untuk saling menerima, mengerti, dan memahami perbedaan yang ada.¹⁸ Seiring berjalannya waktu konflik ini terus terjadi, dan imigran juga turut bertambah. Walaupun hidup berdampingan, perlakuan tidak menyenangkan terus dialami oleh imigran India di lingkungan sosialnya seperti lingkungan kerja dan sekolah.

Berdasarkan peristiwa tersebut, penerapan nilai – nilai multikulturalisme terhadap kebijakan imigrasi Australia dengan studi kasus imigran India menarik untuk diteliti. Kebijakan imigrasi di satu sisi membuka pintu untuk imigran India namun menimbulkan konflik horizontal di Australia. Konflik dalam bentuk rasisme, diskriminasi, dan kekerasan yang terus terjadi terhadap imigran India. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada penerapan nilai – nilai multikultural terhadap imigran India.

¹⁶ Lucas Santos, “What Can Australian Sport Take from the Azeem Rafiq Case?,” Monash Lens, November 26, 2021, <https://lens.monash.edu/@politics-society/2021/11/26/1384208/what-can-australian-sport-take-from-the-azeem-rafiq-case>.

¹⁷ Lucas Santos, “What Can Australian Sport Take from the Azeem Rafiq Case?,” Monash Lens, November 26, 2021, <https://lens.monash.edu/@politics-society/2021/11/26/1384208/what-can-australian-sport-take-from-the-azeem-rafiq-case>.

¹⁸ Universitas Islam Indonesia, “Upaya Menghapus Diskriminasi Dan Rasisme Di Australia - Universitas Islam Indonesia,” Universitas Islam Indonesia, Februari 25, 2021, <https://www.uii.ac.id/upaya-menghapus-diskriminasi-dan-rasisme-di-australia/>.

1.2 Rumusan Masalah

Kedatangan imigran India secara besar – besaran memberi dampak baik bagi Australia. Penerapan kebijakan ini memudahkan pekerja imigran terlatih masuk ke Australia tanpa harus melewati proses yang sulit karena perbedaan ras dan budaya. Sejak tahun 2017, India menduduki posisi pertama sebagai negara dengan imigran terbanyak di Australia. Kedatangan mereka yang semakin banyak setiap tahun memberi dampak yang positif bagi Australia terutama dari segi ekonomi. Namun di balik kondisi tersebut, imigran India mengalami perlakuan tidak menyenangkan, mereka mendapat perlakuan diskriminasi karena perbedaan warna kulit, kekerasan karena perbedaan budaya, hingga pelecehan. Kebijakan imigrasi yang telah diterapkan Australia nyatanya memunculkan permasalahan baru, yaitu rasisme, diskriminasi, dan kekerasan yang terutama dialami oleh imigran India. Oleh karena itu menarik untuk diteliti bagaimana upaya Australia dalam penerapan nilai – nilai multikulturalisme dalam kebijakan imigran terhadap imigran India.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah “bagaimana upaya Australia dalam penerapan nilai - nilai multikulturalisme dalam kebijakan imigrasi terhadap imigran India?”

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya Australia dalam menerapkan nilai – nilai multikulturalisme kedalam kebijakan imigrasi dengan studi kasus imigran India.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat sebagai literatur dalam pengembangan studi Hubungan Internasional terkhusus bagi mahasiswa mengenai penerapan sebuah kebijakan oleh negara untuk negara dan masyarakat internasional.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi negara – negara khususnya negara penerima imigran dan bagi para pembuat kebijakan serta *stakeholders* terkait penerapan kebijakan penerimaan imigran masuk di suatu negara.

1.6 Studi Pustaka

Artikel pertama berjudul *A New Era in Australian Multiculturalism? From Working-Class "Ethnics" To a "Multicultural Middle-Class"* ditulis oleh Val Colic-Peisker dan dimuat di JSTOR. Artikel ini menjelaskan bagaimana pergeseran komposisi dan persepsi multikulturalisme terjadi di Australia. Pergeseran ini ditandai dengan transisi dari masyarakat yang di dominasi oleh kulit putih menjadi masyarakat berbagai etnis melalui perubahan kebijakan, tercerminkan bahwa adanya peralihan cara pandang dan praktik multikulturalisme di Australia. Dari yang awalnya fokus kepada integrasi sosial dan ekonomi, menjadi fokus kepada keragaman dan budaya. Perubahan ini terjadi karena berbagai faktor, pengaruh paling utama adalah perubahan kebijakan imigrasi, kondisi ekonomi, dan sikap sosial.

Penerapan multikulturalisme sebagai kebijakan nasional pada tahun 1970-an turut berkontribusi terhadap beberapa perubahan. Meningkatnya pengaruh ekonomi kelompok imigran dan meningkatnya pengakuan atas kontribusi budaya juga

berperan dalam perubahan ini. Setelah kebijakan diterapkan, Australia menjadi negara yang lebih beragam dengan penduduk yang sebagian besar mengidentifikasi sebagai non-Anglo-Celtic. Implikasi dari perubahan ini sangat signifikan, timbulnya kesadaran akan pentingnya keberagaman budaya dan perlunya kebijakan yang mendukung keberagaman tersebut.

Artikel ini layak menjadi referensi bagi peneliti untuk melihat bagaimana multikultural mempengaruhi Australia. Tulisan ini menjelaskan proses awal dari diterapkannya nilai - nilai multikultural hingga bagaimana respon masyarakat kulit putih terhadap diterapkannya kebijakan tersebut. Artikel ini lebih berfokus membahas mengenai masa lalu Australia saat menerapkan *white Australia policy* dan transisi menuju nilai - nilai multikultural. Sedangkan tulisan peneliti akan berfokus mengenai bagaimana penerapan kebijakan baru tersebut diterapkan di Australia dengan menggunakan imigran India sebagai studi kasus.

Artikel kedua berjudul *The Development and Meaning of the Concept of Multiculturalism* yang ditulis oleh Lilla Berkes dimuat di Academia. Artikel ini fokus menjelaskan mengenai konsep multikultural. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa konsep multikultural adalah gagasan yang menjelaskan dimana identitas suatu kelompok budaya yang berbeda harus diakui, dilestarikan, dan didukung dalam masyarakat. Hal ini demi mengatasi permasalahan yang dapat timbul dari marginalisasi kelompok minoritas di sebuah daerah. Inti dari ide multikulturalisme adalah keberagaman, pengakuan, identitas, dan hak minoritas.

Konsep multikultural pertama muncul di Amerika Utara dan Eropa pada tahun 1960-an sebagai respon dari munculnya keberagaman masyarakat dan marginalisasi kelompok minoritas. Konsep ini diperkuat dengan meningkatnya

migrasi yang mengakibatkan beberapa negara mulai menerapkan kebijakan multikultural. Perkembangan multikulturalisme dipengaruhi beberapa faktor seperti gerakan hak – hak sipil, berakhirnya kolonialisme, dan runtuhnya komunisme. Multikulturalisme adalah gagasan yang menghargai keberagaman dan berusaha mengatasi konflik yang disebabkan oleh keberagaman budaya dan marginalisasi kelompok minoritas.

Artikel ini layak menjadi referensi bagi peneliti untuk melihat definisi dari konsep multikulturalisme yang menjadi kebijakan di Australia dalam meningkatkan pembangunan negaranya. Adanya penjelasan mengenai definisi multikultural, peneliti dapat memahami lebih jelas bagaimana konsep multikultural dapat merubah kebijakan di Australia. Artikel ini juga membantu peneliti untuk memahami bagaimana konsep multikulturalisme diterapkan di sebuah negara. Artikel ini tidak membahas mengenai penerapan nilai - nilai multikultural di Australia dan hanya fokus menjelaskan tentang nilai - nilai multikultural. Namun peneliti akan menjelaskan lebih lanjut mengenai penerapan nilai - nilai multikultural di Australia.

Artikel ketiga berjudul *What is the Australian model for managing cultural diversity?* yang ditulis oleh Jawad Syed dan Robin Kramar dimuat di ResearchGate. Artikel ini menjelaskan bagaimana Australia mengelola keberagaman budayanya melalui beberapa cara, termasuk makro, meso, dan mikro. Pada tingkat makro, mengkaji inisiatif hukum dan kebijakan publik untuk mengelola keanekaragaman budaya. Pada tingkat meso, mengkaji berbagai cara untuk mengelola keberagaman di tempat kerja, termasuk persyaratan bagi organisasi untuk menghapus diskriminasi dan menciptakan kesempatan kerja yang setara bagi semua etnis. Pada

tingkat mikro, mengkaji isu – isu terkait ketenagakerjaan yang dialami oleh pekerja minoritas.

Artikel ini menyebutkan bahwa perlu adanya desentralisasi yang melibatkan hukum dan organisasi untuk mengelola keanekaragaman budaya secara efektif. Salah satu cara Australia dalam mengelola perbedaan budaya adalah dengan memberi lapangan kerja yang setara. Australia berusaha menciptakan lingkungan kerja yang dapat menghargai dan menerima keanekaragaman latar belakang budaya seseorang. Penting juga cara – cara untuk mengatasi permasalahan yang dapat timbul terkait ketenagakerjaan yang dihadapi oleh pekerja minoritas karena identitas etnis, agama, dan bahasa mereka. Pendekatan ini dikatakan mengalami perkembangan yang signifikan dalam mengelola keberagaman budaya, karena menawarkan pendekatan komprehensif yang mengatasi tantangan perbedaan budaya dalam masyarakat multikultural.

Artikel ini membantu peneliti untuk bisa melihat lebih detail pendekatan seperti apa yang diterapkan Australia dalam mengatasi keanekaragaman budaya. Tidak hanya itu, tulisan ini juga menjelaskan bagaimana Australia mengatasi isu – isu yang muncul di tempat kerja yang berhubungan dengan kelompok minoritas. Pengelolaan hukum yang jelas tentang keberagaman budaya dapat menciptakan lingkungan kerja inklusif yang dapat menghargai latar belakang budaya yang berbeda – beda. Berbeda dengan penelitian peneliti, artikel ini tidak menjelaskan mengenai kebijakan imigrasi, namun berfokus pada masalah yang timbul di masyarakat yang beranekaragam.

Artikel keempat berjudul *Rethinking Australian Multiculturalism: Towards a New Paradigm* yang ditulis oleh Laksiri Jayasuriya dan dimuat di JSTOR. Artikel

ini membahas mengenai perlunya pendekatan baru untuk Australia dalam mengelola keberagaman budayanya. Tujuannya adalah untuk meninggalkan paradigma multikulturalisme lama yang sangat menekankan keadilan sosial dan pelestarian budaya, dan menggantinya dengan strategi yang lebih dinamis dan inklusif yang mempertimbangkan perkembangan keberagaman Australia. Hal ini dikarenakan sistem multikulturalisme tradisional yang muncul pada tahun 1960-an tidak lagi cukup untuk mengatasi keragaman budaya yang ada di Australia saat ini.

Pendekatan tradisional berfokus pada perbedaan budaya dan mendorong kesetaraan sosial, namun hal itu dinilai tidak cukup untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan antargenerasi, adaptasi budaya, perkawinan, dan semakin luasnya keragaman budaya, bahasa, dan agama para imigran Australia. Keragaman budaya bukan hanya tentang mempertahankan perbedaan, tetapi juga mendorong adanya perubahan dan penciptaan budaya baru. Pola pikir ini juga menekankan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan pemahaman budaya dan kohesi sosial. Pentingnya membekali siswa/i di Australia tentang pengetahuan, keterampilan, dan nilai – nilai yang diperlukan untuk menavigasi lanskap budaya Australia yang beragam.

Artikel ini membantu peneliti melihat bahwa perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan dinamis dalam mengelola keragaman budaya di Australia. Artikel ini menggarisbawahi nilai pendidikan dalam menumbuhkan kekompakan sosial dan pemahaman budaya serta perlunya pendekatan baru terhadap pendidikan multikultural yang mempertimbangkan keragaman yang terus berkembang di Australia. Perlu adanya *upgrade* sistem yang menyesuaikan dengan zaman yang terus berkembang. Fokus dari artikel ini adalah tentang keragaman dan bagaimana

menyatukannya menggunakan nilai - nilai multikultural yang lebih modern. Namun artikel ini tidak membahas secara spesifik mengenai imigran.

Artikel kelima berjudul *Citizenship and Immigration: Multiculturalism, Assimilation, and Challenges to the Nation-State* yang ditulis oleh Irene Bloemraad, Anna Korteweg, dan Gökçe Yurdakul. Artikel ini sesuai dengan judulnya mengkaji hubungan kompleks antara kewarganegaraan, imigrasi, multikulturalisme, dan asimilasi. Artikel ini mengulas bagaimana konsep – konsep ini saling terkait dan mempengaruhi negara, bangsa, dan warga negaranya. Definisi kewarganegaraan menurut tulisan ini adalah warga yang mencakup status hukum, hak, partisipasi, dan kepemilikan. Imigrasi internasional menimbulkan tantangan terhadap gagasan tradisional tentang kewarganegaraan yang dikaitkan dengan komunitas politik.

Para peneliti artikel ini berpendapat bahwa cakupan dan keragaman imigrasi menyebabkan penilaian ulang terhadap kewarganegaraan dan hubungannya dengan negara dan bangsa. Artikel ini dibagi menjadi tiga bagian, bagian pertama membahas dasar – dasar kewarganegaraan, dengan argument tentang multikulturalisme, asimilasi, dan kewarganegaraan etnis *versus* sipil. Perlunya pemahaman mengenai kewarganegaraan karena pemahaman tradisional antara multikulturalisme dan asimilasi mungkin berlebihan. Bagian kedua berfokus pada tantangan negara dan bangsa yang ditimbulkan oleh imigrasi. Para peneliti membahas bagaimana imigrasi telah mengarah pada pengembangan bentuk – bentuk kewarganegaraan baru.

Para peneliti juga mengkaji peran negara dan bangsa dalam membentuk lembaga – lembaga yang memberikan akses berbeda terhadap partisipasi dan rasa memiliki. Bagian ketiga para peneliti membahas mengenai kesenjangan, dimana

perlu adanya pendekatan yang lebih terpadu dalam memahami kewarganegaraan, dengan memperhatikan bahwa kesenjangan antara pandangan multikultural dan asimilasi kewarganegaraan mungkin terlalu berlebihan.

Artikel ini membantu peneliti dalam melihat gambaran komprehensif tentang hubungan imigrasi satu warga negara (India) dan pengaruhnya terhadap perubahan sebuah kebijakan negara lain (Australia). Dimana penelitian ini menfokuskan kajian terhadap pemahaman yang lebih dinamis dan detail mengenai hubungan antara imigrasi, dan multikulturalisme dan bagaimana hal tersebut menciptakan kewarganegaraan baru. Namun berbeda dengan penelitian peneliti, artikel ini tidak membahas mengenai penerapan kebijakan imigrasi di Australia.

1.7 Kerangka Konseptual

International policy transfer lahir dari penelitian yang dilakukan oleh Dolowitz dan Marsh dalam penelitian yang berjudul *What Have We Learned from Policy transfer Research*. Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana kebijakan dapat dipindahkan dari satu negara ke negara lain, baik melalui saluran formal maupun informal. Akar dari *policy transfer* adalah *policy diffusion*, proses di mana kebijakan, ide, atau praktik tertentu menyebar dari satu negara, wilayah, atau organisasi ke negara, wilayah, atau organisasi lain.¹⁹ Konsep ini menjelaskan bahwa adopsi kebijakan sering dipengaruhi oleh jaringan antar pemerintah, organisasi internasional, dan aktor non-negara.²⁰

¹⁹ David Benson and Andrew Jordan, "What Have We Learned from Policy Transfer Research? Dolowitz and Marsh Revisited," *Political Studies Review* 9, no. 3 (Agustus 11, 2011): 366–78, <https://doi.org/10.1111/j.1478-9302.2011.00240.x>.

²⁰ Dietmar Braun and Fabrizio Gilardi, "Taking 'Galton's Problem' Seriously," *Journal of Theoretical Politics* 18, no. 3 (Juli 2006): 298–322, <https://doi.org/10.1177/0951629806064351>.

Dalam penelitian tersebut Dolowitz dan Marsh juga membedakan antara *policy diffusion* dan *policy transfer*. *Policy diffusion* merujuk pada proses spontan penyebaran kebijakan dari satu negara ke negara lain, sedangkan *policy transfer* merujuk pada proses adopsi kebijakan yang lebih sistematis dan berorientasi pada tujuan spesifik.²¹ Dolowitz dan Marsh menunjukkan bahwa kebijakan dapat dipindahkan dan diadopsi dalam konteks yang berbeda – beda, serta bagaimana proses ini dapat memfasilitasi pembelajaran dan perbaikan kebijakan. Penelitian Dolowitz dan Marsh tentang *policy transfer* kemudian berkembang menjadi alat analisis yang penting dalam bidang kebijakan publik, membantu memahami bagaimana kebijakan dapat dipindahkan dan diadopsi dalam berbagai konteks.

Dolowitz dan Marsh mendefinisikan *policy transfer* sebagai proses di mana pengetahuan tentang kebijakan, pengaturan administratif, lembaga, dan ide dalam suatu sistem politik digunakan dalam pengembangan kebijakan, pengaturan administratif, lembaga, dan ide di sistem politik lainnya. Objek dari konsep transfer melibatkan kebijakan, institusi, ideologi atau justifikasi, dan sikap atau ide. Proses *international policy transfer* melibatkan pembelajaran melalui pertukaran ide, informasi, dan keahlian antar aktor, yang memfasilitasi terjadinya proses transfer kebijakan. Konsep ini tidak hanya dilakukan oleh negara, namun juga organisasi internasional, atau individu yang berperan sebagai seorang *policy ambassador*.

Terdapat 2 tipe *policy transfer*, yaitu *voluntary transfer* dan *coercive transfer*. *Voluntary transfer* adalah negara yang secara sukarela mengadopsi kebijakan yang telah terbukti efektif di tempat lain. Negara akan memilih untuk mengadopsi kebijakan atau praktik dari konteks lain berdasarkan kebutuhan negaranya. Ini

²¹ David P. Dolowitz and David Marsh, "Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making," *Governance* 13, no. 1 (Januari 2000): 5–23.

sering terjadi ketika ada hal yang dirasa kurang puas dan butuh perbaikan dengan kebijakan yang ada. *Voluntary transfer* terjadi karena terpengaruh dari negara lain, standar internasional, atau praktik yang dipromosikan oleh organisasi internasional.²² Misalnya, negara dapat mengadopsi kebijakan pendidikan dari negara lain yang telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Pada dasarnya, *Voluntary transfer* dapat dilihat dari kebebasan pembuat kebijakan untuk mengadopsi praktik berdasarkan manfaat yang dirasakan.

Coercive transfer adalah ketika negara diharuskan untuk mengadopsi kebijakan tertentu karena tekanan atau kewajiban eksternal. Ini bisa terjadi di mana suatu pihak memaksakan kebijakan pada yang lain secara langsung maupun tidak langsung, dan kemudian pihak eksternal menciptakan lingkungan yang memaksa untuk mengadopsi. *Coercive transfer* bisa terjadi karena dua hal, yaitu *direct coercive transfer* dan *indirect coercive transfer*. *Direct coercive transfer* adalah ketika adanya tekanan eksplisit dari satu pemerintah atau organisasi untuk mengadopsi kebijakan tertentu. Misalnya, suatu negara akan diminta untuk menerapkan kebijakan ekonomi baru sebagai syarat untuk menerima bantuan dari lembaga keuangan internasional.

Indirect coercive transfer terjadi ketika faktor eksternal seperti kemajuan teknologi atau perubahan tren. Hal ini kemudian menciptakan situasi di mana suatu negara merasa terpaksa mengadopsi kebijakan tertentu agar tetap bisa bersaing dengan negara lain atau menghindari konsekuensi negatif.²³ Misalnya, negara harus

²² David Benson and Andrew Jordan, "What Have We Learned from Policy Transfer Research? Dolowitz and Marsh Revisited," *Political Studies Review* 9, no. 3 (August 11, 2011): 366–78, <https://doi.org/10.1111/j.1478-9302.2011.00240.x>.

²³ David Benson and Andrew Jordan, "What Have We Learned from Policy Transfer Research? Dolowitz and Marsh Revisited," *Political Studies Review* 9, no. 3 (August 11, 2011): 366–78, <https://doi.org/10.1111/j.1478-9302.2011.00240.x>.

mengadopsi langkah – langkah penghematan di bawah tekanan dari *International Monetary Fund* (IMF) untuk mendapatkan bantuan keuangan. Lalu juga ada peraturan lingkungan yang diberlakukan pada negara berkembang melalui perjanjian internasional yang mengharuskan negara – negara untuk patuh agar terhindar dari sanksi. Mudahnya, coercive transfer bisa dilihat dari keterlibatan tekanan eksternal yang memaksa sebuah adopsi, seringnya di bawah ancaman konsekuensi negatif.

Organisasi internasional seperti Bank Dunia, International Monetary Fund, dan Perserikatan Bangsa – Bangsa mulai memainkan peran penting dalam mempromosikan atau bahkan memaksakan kebijakan tertentu kepada negara – negara anggotanya. Hal ini memperkuat fenomena *policy transfer* karena negara sering mengadopsi kebijakan yang didorong oleh rekomendasi atau persyaratan dari organisasi – organisasi internasional. Terdapat 6 indikator terjadinya *policy transfer*, yaitu:

1. Aktor yang terlibat

Aktor adalah kunci dari terjadinya *policy transfer*. Aktor – aktor ini adalah pemerintah, lembaga internasional, IGO, NGO, bahkan individu yang berpengaruh.

2. Pembelajaran kebijakan

Mempelajari permasalahan dan kebijakan – kebijakan yang cocok ditransfer untuk mengatasi isu di suatu negara. Hal ini penting karena perlu adanya analisis dan pertukaran ide untuk mencari kebijakan yang menjadi solusi dari sebuah isu.

3. Jenis kebijakan

Menganalisis jenis kebijakan, asal kebijakan yang akan ditransfer, dan negara yang akan menerapkan kebijakan transfer tersebut. Kebijakan tersebut juga harus sesuai dengan nilai dan ideologi yang ada di negara tujuan.

4. Adaptasi kebijakan

Kebijakan yang akan ditransfer telah disesuaikan dan diadaptasi dengan negara tujuan. Kebijakan yang akan diterapkan harus sesuai dengan kebutuhan dan tidak dapat diadopsi sama sepenuhnya.

5. Keberhasilan implementasi

Adanya evaluasi keberhasilan kebijakan yang ditransfer, termasuk dampak yang dihasilkan dan pandangan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Keberhasilan implementasi dapat dilihat dari respon masyarakat.

6. Penilaian kinerja

Penilaian kinerja kebijakan yang ditransfer. Apakah kebijakan tersebut cocok diterapkan di negara tersebut dan berdampak positif. Penilaian ini juga dapat dilihat melalui respon masyarakat terhadap kebijakan yang ditransfer.²⁴

Dalam kasus ini, Australia melakukan *policy transfer* dari kebijakan multikultural Kanada dengan dorongan dari PBB dan UNESCO yang kemudian melahirkan kebijakan imigrasi dengan nilai – nilai multikultural.

²⁴ David Benson and Andrew Jordan, “What Have We Learned from Policy Transfer Research? Dolowitz and Marsh Revisited,” *Political Studies Review* 9, no. 3 (Agustus 11, 2011): 366–78, <https://doi.org/10.1111/j.1478-9302.2011.00240.x>.

1.8 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengumpulan data melalui berbagai sumber informasi seperti observasi, analisis dokumen, dan wawancara.²⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang merupakan suatu pendekatan penelitian berfokus pada pengumpulan dan analisis data melalui berbagai sumber informasi.²⁶

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis permasalahan penelitian agar mudah dipahami melalui pengaplikasian konsep yang sesuai dengan fenomena.

1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan penelitian berguna sebagai acuan agar peneliti tetap fokus meneliti dalam batasan yang telah ditentukan. Adapun batas penelitian yang telah peneliti tetapkan yaitu pada rentang tahun 2017 hingga 2023. Rentang waktu tersebut dipilih karena tahun 2017 hingga 2023 adalah masa meningkatnya imigran India yang masuk ke Australia.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis adalah unit yang perilakunya akan dianalisis, dijelaskan, dan diramalkan.²⁷ Unit analisis dalam penelitian ini adalah upaya Australia dalam penerapan nilai – nilai multikultural. Unit eksplanasi adalah unit yang memberi

²⁵ John W Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative & Mixed Methods Approaches*, 6th ed. (Los Angeles: Sage, 2023).

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2013).

²⁷ Mohtar Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi", (LP3ES: Jakarta, 1990), 43-44.

dampak terhadap unit analisis. Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah kebijakan imigrasi Australia terhadap imigran India.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi pustaka (*library research*). Studi kepustakaan adalah proses mengidentifikasi sumber – sumber informasi yang faktual, seperti pendapat ahli yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.²⁸ Sumber informasi untuk mendukung studi pustaka dapat berupa artikel jurnal, buku, laporan, biografi, dan lain – lain. Dalam penelitian ini, sumber utama yang peneliti jadikan referensi adalah jurnal, buku, *website* pemerintah, dan portal berita resmi.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan tiga tahapan analisis data yang ditulis oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Hubberman, yaitu: ²⁹

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi, menyederhanakan, serta melakukan transformasi terhadap data yang ada di berbagai tulisan yang dijadikan referensi. Dalam penelitian ini, peneliti akan mereduksi data berdasarkan fokus penelitian melalui beberapa kata kunci yaitu kebijakan imigrasi, nilai – nilai multikultural, hubungan Australia dan India, dan imigran India. Penggunaan kata kunci akan memudahkan peneliti untuk mereduksi data agar memperoleh data yang relevan dengan area penelitian.

²⁸Mary W.George, "The Elements of Library Research:What Every Student Needs to Know", (Princeton University Press,New Jersey:2008), 8.

²⁹Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, Theculturelab* (Thousand Oaks, Calif, California: Sage, 1994)

2) Penyajian Data

Tahap selanjutnya dalam menganalisis data adalah menyajikan data. Penyajian data adalah proses meringkas kumpulan informasi yang telah diperoleh dari tahapan sebelumnya dan nantinya akan dibuat kesimpulan dari hasil ringkasan. Bentuk yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah bentuk uraian.

3) Penarikan Kesimpulan

Tahap yang terakhir adalah kesimpulan. Peneliti akan mengambil kesimpulan dari catatan dan penjelasan yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, jenis dan pendekatan penelitian, unit analisis dan tingkat analisis, serta teknik pengumpulan data.

BAB II ISU DAN KEBIJAKAN IMIGRASI AUSTRALIA

Bab ini akan menjelaskan mengenai sejarah multikulturalisme di Australia, dan sejarah datangnya imigran India ke Australia.

BAB III KEBIJAKAN IMIGRASI DENGAN NILAI – NILAI MULTIKULTURALISME DI AUSTRALIA

Bab ini akan menjelaskan mengenai kebijakan imigrasi dengan nilai – nilai multikulturalisme. Bagaimana proses munculnya

multikulturalisme dan pembentukan kebijakan imigrasi dengan nilai – nilai multikulturalisme.

BAB IV UPAYA AUSTRALIA DALAM MENGADOPSI NILAI – NILAI MULTIKULTURALISME TERHADAP KEBIJAKAN IMIGRASI AUSTRALIA

Bab ini akan menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu upaya Australia dalam mengadopsi nilai – nilai multikulturalisme dalam kebijakan imigrasi Australia menggunakan konsep *policy transfer*.

BAB V PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian akhir dari penulisan yang akan berisi kesimpulan dan saran terkait penelitian permasalahan ini.

